

Keunggulan Petahana dan Posisi Nomor Urut atas di Dapil Banten Tahun 2019

Indra Surya Ramadhan*

Ruang Publik Politik (Rublikpol), Jakarta

*Email: indra982010@gmail.com

JISI JURNAL
ILMU SOSIAL
INDONESIA

p-ISSN: 2808-9529 (Printed)
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi>

VOL. 2, NO. 2 (2021)

Page: 85 – 96

Recommended Citation:

Ramadhan, I. (2021). Keunggulan Petahana dan Posisi Nomor Urut atas di Dapil Banten Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 2(2), 85-96.

doi:<https://doi.org/10.15408/jisi.v2i2.22950>

Available at:

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/22950>

Article History:

Received 28 October 2021

Accepted 09 November 2021

Available online 28 December 2021

* Corresponding Author

Abstract. Incumbency status, position number on the ballots, and information dissemination level are indicators of voters' evaluation ability. This article will test the correlations of seat winnings, incumbency status, and candidate's position number on the ballot to explain the voters' evaluation ability in the 2019 Banten Province general election. The test results found that the incumbent status and the position number on the ballot correlate to the winning of seats. The results of the analysis show that incumbents have a greater chance of winning a seat than non-incumbents. It also shows that if the candidates have a position number on the ballot close to the first number, the vote gain is higher and vice versa. This article argues that incumbents and well-positioned candidates would win due to the limited ability of voters to evaluate all candidates and moderated by the lack of information on legislative candidates.

Keywords: Incumbency Advantages, Ballot Position Effect, Voter Evaluation Ability, Seat Winnings.

Abstrak. Kemenangan petahana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon DPR yang memiliki posisi nomor urut atas, serta kondisi persebaran informasi pemilihan legislatif yang rendah memungkinkan indikasi lemahnya kemampuan evaluasi para pemilih. Artikel ini menguji secara bivariat hubungan antara variabel kemenangan kursi dengan variabel status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon-calon DPR di pemilihan umum Provinsi Banten tahun 2019 untuk menjelaskan kemampuan evaluasi pemilih. Hasil uji menemukan status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon legislatif berhubungan dengan kemenangan kursi. Hasil analisis menunjukkan petahana berpeluang lebih besar untuk memenangkan kursi daripada non-petahana. Hasil analisis juga menunjukkan semakin calon legislatif mendekati posisi nomor urut atas, semakin tinggi perolehan suaranya dan sebaliknya. Artikel ini berargumen terjadinya kecenderungan kemenangan petahana dan calon yang memiliki posisi nomor urut atas karena keterbatasan kemampuan evaluasi pemilih yang minim informasi calon-calon legislatif.

Kata Kunci: Keunggulan Petahana, Posisi Nomor Urut Atas, Kemampuan Evaluasi Pemilih, Kemenangan Kursi DPR.



This is an open access article under CC-BY-SA license
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pada 14 September 2018 merilis kajian anatomi Daftar Calon Tetap (DCT) yang menyebutkan 529 dari 560 anggota DPR (94%) kembali mencalonkan diri pada pemilu legislatif DPR RI tahun 2019. (Detik.com, 2019). Formappi mengkritisi kemenangan petahana DPR RI sebanyak 321 orang (56%) dari total 575 anggota DPR 2019-2024 terpilih. Hasil ini menunjukkan kenaikan jumlah kemenangan petahana daripada tahun 2014-2019 yang berjumlah 243 petahana (43,4%). (Parlemenindonesia.org, 2019). Fenomena hubungan kemenangan dan status petahana juga terjadi di tingkat lokal daerah pemilihan Banten (Banten I, II, dan III). Peneliti menemukan sebanyak 12 orang non-petahana (54,5%) dan 10 orang petahana (45,5%) berhasil memenangkan kursi DPR RI dari total 22 kursi yang diperebutkan. Mayoritas kelompok non-petahana mengalami kekalahan (96%), sedangkan kelompok petahana hampir setengahnya memenangkan kursi DPR RI. Formappi menjelaskan kemenangan kembali petahana DPR RI sebagai kenyataan masyarakat Indonesia belum melakukan proses *reward and punishment* terhadap kinerja buruk anggota DPR periode 2014-2019. (Beritasatu.com, 2019).

Data pemenang kursi DPR RI memperlihatkan sebanyak 360 (64,2%) anggota DPR yang terpilih memiliki nomor urut 1 di kertas suara, lalu sebanyak 106 (18,9%) anggota DPR yang terpilih memiliki nomor urut 2, dan sejumlah 29 (5,1%) anggota DPR yang terpilih memiliki nomor urut 3 di pemilihan umum pada tahun 2019 (Formappi 2019) Hal ini mengindikasikan terdapat fenomena hubungan kemenangan kursi dan posisi nomor atas (nomor urut yang mendekati angka 1). Fenomena ini juga terjadi di tingkat lokal daerah pemilihan Banten. Peneliti menemukan dari 22 total kursi DPR RI yang tersedia di daerah pemilihan Banten, sebanyak 14 calon legislatif bernomor urut satu (63,3%) dan 6 calon legislatif bernomor urut dua (27,3%) berhasil memenangkan kursi. Berdasarkan kajian tersebut, secara intuitif ada kemungkinan hubungan posisi nomor urut dengan kemenangan calon anggota legislatif DPR RI tahun 2019 dan hubungan status petahana DPR dengan posisi nomor urut atas.

Keberadaan keunggulan petahana dan menguatnya posisi nomor urut atas terhadap kemenangan kursi legislatif dalam pemilu legislatif menunjukkan kondisi informasi pemilu dan calon legislatif yang rendah dan berdampak terhadap kemampuan evaluasi pemilih (Dettman, Pepinsky, dan Pierskalla 2017; Prihatini 2019: 40-46). Joanne M. Miller dan Jon A. Krosnick (1998:291-330) menjelaskan kondisi masyarakat yang rendah informasi terhadap calon-calon legislatif

menyebabkan pemilih cenderung memilih berdasarkan posisi nomor urut dalam kertas suara yang membiaskan hasil perolehan suara calon yang memiliki nomor urut atas dan akhir. Pengaruh posisi nomor urut dalam kertas suara akan semakin kuat jika pengetahuan tentang pemilihan umum tidak tersebar luas secara publik, masyarakat tidak atau kurang mengetahui calon yang berstatus petahana, dan masyarakat tidak menganggap penting afiliasi partai politik calon sebagai faktor pertimbangan dalam memilih.

Kondisi rendahnya pengetahuan masyarakat terkait informasi calon legislatif yang bertarung dalam pemilu legislatif dapat mengakibatkan ketidaktahuan pemilih terhadap latar belakang dan rekam jejak calon-calon yang berkompetisi, yang selanjutnya memengaruhi pelemahan tingkat evaluasi masyarakat terhadap calon-calon legislatif petahana. Beberapa faktor yang mengindikasikan lemahnya persebaran informasi pemilihan umum legislatif dan calon-calon legislatif di Indonesia meliputi tidak terpublikasikannya DRH calon legislatif, (Kompas.com, 2019) banyaknya calon legislatif yang bertarung dalam satu dapil, tingginya tingkat pembahasan isu pemilu presiden daripada isu pemilu legislatif dalam ruang publik, dan lemahnya antusiasme masyarakat untuk mencari informasi pemilu dan calon-calon legislatif.

Artikel ini berusaha menguji faktor hubungan antara status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara terhadap kemenangan calon legislatif DPR RI di daerah pemilihan Banten (Dapil Banten I, II, III) untuk menjelaskan kemampuan evaluasi pemilih di daerah pemilihan Banten dan mendiskusikannya. Diskusi artikel ini akan diarahkan kepada penjelasan tentang penyebab kemenangan dominan para petahana dan calon legislatif yang memiliki posisi nomor urut atas. Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif dan pengujian secara bivariat. Artikel ini berargumen kemenangan dominan para petahana dan calon legislatif yang memiliki posisi nomor urut atas karena keterbatasan kemampuan evaluasi pemilih yang minim informasi calon-calon legislatif.

Artikel ini mengembangkan argumen melalui beberapa bagian. Bagian pertama membahas tentang kerangka acuan teoritis *incumbency advantages* dan *ballot position effect* yang dijadikan dasar hipotesis penelitian. Bagian kedua, membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari penentuan variabel dan definisi operasional variabel, penjelasan sumber data dan penentuan jenis uji bivariat yang dipakai seperti uji independensi (*chi-square*), uji korelasi *phi*, uji *rank spearman*, dan uji korelasi *pearson*. Bagian ketiga, membahas tentang hasil uji dan menjelaskannya berdasarkan kerangka teori yang dikembangkan. Bagian terakhir, membahas tentang kesimpulan hubungan berbagai variabel

status petahana dan posisi nomor urut terhadap kemenangan calon legislatif DPR RI di daerah pemilihan Banten dan memberikan saran-saran untuk meningkatkan kemampuan evaluasi pemilih terhadap calon-calon legislatif.

LITERATURE REVIEW

1. *Incumbency Advantages* (Keunggulan Petahana)

Premis dasar teori ini adalah petahana legislatif memiliki keunggulan daripada non-petahana karena dapat memfokuskan perhatian pemilih untuk mendapatkan kesan yang lebih baik dengan melakukan kontrol informasi terkait kinerja petahana di DPR. Menurut Glenn Parker, keunggulan petahana dapat terjadi jika tingkat informasi masyarakat terkait pemilihan DPR rendah (1980:449-464). Tingkat informasi yang rendah dalam masyarakat mendorong masyarakat untuk tetap memilih petahana DPR karena aliran informasi tentang kinerja petahana dapat dikuasai oleh petahana itu sendiri. Kekuasaan aliran informasi kinerja petahana menyebabkan pemilih cenderung memilih petahana yang dianggap memiliki pengalaman lebih baik di DPR dan menolak calon legislatif non-petahana yang belum tentu lebih baik (Parker 1980:449-464).

David R. Mayhew (1974) pertama kali mencetuskan konsep keunggulan petahana dengan menjelaskan petahana akan mencoba membangun koneksi elektoral (*electoral connection*). Koneksi elektoral adalah jaringan hubungan petahana dengan pemilih dapil yang dibuat petahana secara independen yang terpisah dari partai politik untuk berhubungan secara langsung kepada konstituen dengan memanfaatkan posisi jabatan petahana. Mayhew (1974) menggambarkan sistem elektoral single member district (SMD) di Amerika menguntungkan petahana karena ada insentif bagi calon legislatif individual untuk berperilaku independen dari partai politik untuk membangun koneksi langsung dengan pemilih petahana. Keunggulan-keunggulan petahana dalam membangun koneksi elektoral meliputi advertising atau pengiklanan kapasitas diri, membangun kepercayaan masyarakat dengan mengklaim telah membentuk kebijakan yang menguntungkan masyarakat (*credit claiming*), dan membuat penilaian (*judgemental*) tentang masalah publik tertentu untuk memberikan posisi yang lebih menguntungkan petahana (*position taking*) di mata masyarakat (Mayhew 1974).

Richard F. Fenno (1978) menjelaskan proses terjadinya keunggulan petahana anggota kongres di Amerika melalui usaha petahana membangun hubungan personal dan *clientelistic* dengan pemilih dengan memanfaatkan jaringan sosial, hubungan

finansial, dan sumberdaya organisasi milik petahana. Fenno (1978) menyebut hubungan petahana dan pemilihnya sebagai *home style* yaitu hubungan petahana dan pemilih yang tumbuh dari para pendukung personal petahana (*Intimates personal constituency*) di daerah pemilihan petahana. Proses ini memerlukan petahana untuk terus berhubungan dengan distrik pemilihannya.

Gary. W. Cox dan Jonathan N. Katz (1996: 478-497) menjelaskan sifat keunggulan petahana tidak hanya berpengaruh secara langsung (*direct effect*), seperti yang dijelaskan Richard F. Fenno tentang sumberdaya petahana, tetapi juga dapat melihat sifat pengaruh tidak langsungnya (*indirect effect*). Menurut Cox dan Katz (1996: 478-497) petahana dapat memberikan pengaruh tidak langsung kepada non-petahana dengan pengaruh menakut-nakuti non-petahana (*scare-off effect*) dan memengaruhi non-petahana melalui kualitas pengalaman petahana (*quality effect*).

John M. Stonecash (2008: 112) merupakan peneliti awal yang merevisi dan meragukan keunggulan petahana dengan memperlihatkan data perkembangan hasil pemilihan umum di Amerika. Cash menjelaskan bahwa keunggulan petahana semenjak tahun 1970-an di Amerika mulai melemah. Menurut Stonecash (2008: 112), faktor partai politik lebih memengaruhi kemenangan calon legislatif daripada status petahana pada tahun-tahun 1980-an.

Seiring berjalannya waktu, teori keunggulan petahana mulai menghadapi perdebatan tentang keberadaan atau tingkat pengaruh keunggulan petahana terhadap kemenangan calon. Pada awalnya, kebanyakan sistem elektoral *single member district* (SMD) cenderung mendukung kebenaran teori keunggulan petahana. Namun, Yogesh Uppal (2009: 9-27) menunjukkan keunggulan petahana tidak terjadi di India yang memiliki sistem elektoral SMD. Uppal menemukan tidak hanya keunggulan petahana tidak terjadi, bahkan menemukan ketidakunggulan petahana (*disadvantage incumbency*). Ketidakunggulan petahana semakin terasa ketika berada dalam wilayah bagian negara yang memiliki tingkat fasilitas kesehatan rendah, kemiskinan, pendapatan rendah, dan pengangguran.

Hasil penelitian Uppal (2009: 9-27) menunjukkan kemampuan evaluasi pemilih yang cukup baik terhadap kinerja petahana. Selain Uppal, Molina (2001: 427-446) menunjukkan ketidakunggulan petahana (*disadvantage incumbency*) parlemen pada negara-negara berkembang seperti negara-negara di Kepulauan Karibia dan Amerika Latin. Keunggulan petahana seringkali dikaitkan dengan sistem elektoral *single-member district* (SMD), padahal keunggulan petahana dapat terjadi dengan sistem elektoral *multi-member district* (MMD). Hasil penelitian Mert Moral, H. Ege Ozen, Efe Tokdemir (2015: 56-65) di

Turki yang menggunakan sistem elektoral *multi-member district* (MMD) berjenis proporsional tertutup (*closed list proportional system*) menunjukkan setting institusional sistem elektoral dapat memberikan insentif kepada partai politik untuk menerjunkan petahana dengan pertimbangan faktor ukuran distrik dan tingkat instabilitas sistem kepartaian. Semakin tidak stabil, semakin partai mau menerjunkan petahana. Penelitian Moral et, al. (2015: 56-65) memberikan gambaran bahwa sistem *multi member district* (MMD) berjenis proporsional tertutup dapat memberikan keunggulan petahana.

Kenichi Ariga (2010) menghasilkan salah satu disertasi yang cukup komprehensif dalam membahas keunggulan petahana dengan menganalisis secara komparatif keunggulan petahana di antara berbagai jenis sistem elektoral di negara-negara demokrasi maju. Ariga menguji dua varian keunggulan petahana: *incumbent advantages for parties* (keuntungan yang diperoleh partai politik dengan menerjunkan calon legislatif petahana) dan *incumbency advantages for individual* (keuntungan yang dinikmati oleh petahana individu dibandingkan calon non-petahana dari partai yang sama).

Ariga (2010) menjelaskan *incumbent advantages for parties* dapat terjadi ketika ada keuntungan elektoral yang didapatkan partai politik dari menempatkan petahana dengan mempertimbangan besaran dapil. Ariga (2010: 123-130) menemukan keunggulan petahana bagi partai akan lebih besar jika sistem elektoral dalam suatu negara memiliki kompetisi intra partai. Namun, semakin besar dapil (berarti semakin besar kompetisi dalam dapil) semakin lemah keunggulan petahana bagi partai. Dalam *single member district* yang memiliki kompetisi intra partai yang lebih rendah dan besaran dapil yang tidak terlalu besar, terbukti ada keunggulan petahana dan secara statistik signifikan, sedangkan dalam sistem *multi member district* tanpa kompetisi intra partai, keunggulan petahana tidak terjadi secara statistik signifikan. Jika sistem SMD dan MMD tidak memiliki kompetisi intrapartai, maka tidak terlihat ada keunggulan petahana. Oleh karena itu, Ariga (2010: 123-130) menyimpulkan kunci keberadaan keunggulan petahana bagi partai politik terdapat dalam sistem elektoral yang memiliki kompetisi intra partai dan besaran dapil yang tidak besar.

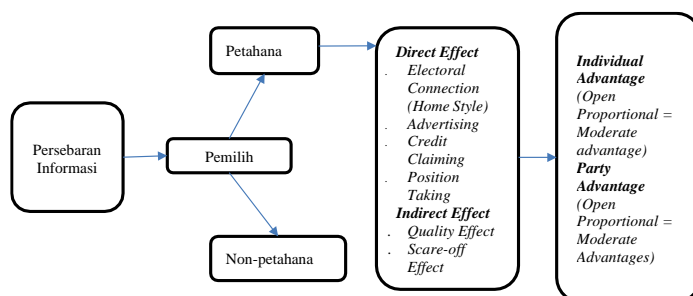
Menurut Ariga (2010: 123-130) *incumbency advantages for individual* lebih sulit terjadi pada sistem berjenis MMD yang memiliki kompetisi intra partai dan pengejaran *personal vote* daripada sistem SMD. Ariga (2010: 123-130) menghitung keunggulan petahana dengan cara membandingkan hasil probabilitas gabungan margin probabilitas untuk bertarung kembali dan probabilitas memenangkan kursi setelah bertarung kembali di

negara-negara demokrasi maju. Hasil penelitian Ariga (2010: 123-130) menunjukkan *incumbency advantages for individual* lebih kuat dalam sistem SMD yang tidak memperbolehkan kompetisi intrapartai daripada di sistem MMD yang memperbolehkan kompetisi intrapartai.

Ariga (2010: 123-130) juga menunjukkan sistem proporsional terbuka yang bercirikan kompetisi intrapartai, hak pemilih untuk menggunakan suara personal (seperti Italia) dan memiliki variasi besaran dapil, cenderung memiliki keunggulan petahana secara individual yang lebih besar dibandingkan sistem MMD lainnya. Mengikuti teori yang dikembangkan oleh Ariga, Indonesia yang menggunakan sistem proporsional terbuka seharusnya memiliki keunggulan petahana yang lebih besar daripada sistem MMD lainnya, terlebih jika besaran daerah pemilihan suatu pemilihan mengecil.

Dettman et, al. (2017) menjelaskan keunggulan petahana terjadi, bersifat positif dan secara statistik signifikan terhadap perolehan suara dan kemenangan kursi di Indonesia. Selain itu ditemukan dampak status petahana yang bersifat negatif (jika calon legislatif memiliki status petahana maka petahana cenderung mendapatkan nomor urut atas) dan secara statistik signifikan terhadap posisi nomor urut. Berikut skema kerangka teori *incumbency advantages*:

Gambar II.1. Skema Kerangka Teori Keunggulan Petahana



Sumber: diolah dan dikembangkan dari berbagai sumber seperti (Mayhew 1974; Fenno 1978; Moral et, al. 2015: 56-65; Ariga 2010: 123-130)

Ballot Position Effect

Miller dan Krosnick (1998:291-330) mengembangkan teori *ballot position effect* yang berasal dari teori psikologi yaitu dampak pengurutan suatu objek. Asumsi dasar teori ini adalah urutan sebuah kumpulan objek dapat memengaruhi kecenderungan bias pemilih memilih sebuah objek yang memiliki urutan awal daripada objek yang memiliki urutan akhir. Krosnick (1998:291-330) menjelaskan orang-orang cenderung melakukan bias konfirmasi (*confirmatory bias*) dalam proses pemilihan caleg. Konfirmasi bias adalah suatu proses memilih pemilih yang dimulai dengan mencari ingatan informasi sebuah objek, lalu

mencari dan menerima alasan subjektif dalam memilih sebuah objek tertentu, bukan mencari alasan untuk tidak memilih sebuah objek tertentu. Berdasarkan asumsi tersebut, pemilih cenderung mencari alasan untuk memilih calon legislatif pada urutan awal dan membiarkan antara perolehan suara calon legislatif yang memiliki urutan awal dan akhir.

Dalam mencari alasan memilih dari kumpulan objek, pemilih cenderung akan mencoba mengevaluasi kumpulan objek-objek tersebut. Proses evaluasi terhadap kumpulan objek-objek akan menyebabkan kelelahan kognitif (*cognitive fatigue*) pemilih yang menguatkan bias konfirmasi. Kelelahan kognitif adalah proses evaluasi yang terlalu berat bagi pemilih yang biasanya disebabkan daftar panjang nama-nama calon dalam kertas suara. Daftar panjang nama-nama calon akan menyebabkan proses usaha evaluasi secara objektif yang dilakukan pemilih cenderung gagal karena kekurangan informasi terhadap masing-masing calon legislatif. Sekalipun proses evaluasi pemilih terhadap caleg cenderung tidak objektif, pemilih tetap akan berusaha menggunakan hak pilih memilih calon-calon legislatif dengan evaluasi seadanya dan secara subjektif. Pemilih yang mengalami kelelahan kognitif akan berasumsi evaluasi seadanya yang dilakukan pemilih tidak akan berbahaya bagi pemilu karena satu suara pemilih dari total suara pemilu tidak akan terlalu bermakna dalam menentukan keberhasilan kemenangan seorang caleg. Proses pemilihan yang berasal dari kelelahan kognitif ini akan berdampak pada biasanya pemilih untuk memilih nomor urut atas yang lebih tampak untuk dievaluasi dan dicari alasan-alasan dalam memilih calon. Miller dan Krosnick (1998:291-330) mengatakan daftar panjang nama-nama calon legislatif dalam kertas suara akan semakin menguatkan faktor nomor urut dalam kemenangan seorang calon ketika tidak ada tanda-tanda (*cues*) dalam kertas suara yang terlihat seperti asal partai dan petahana.

Menurut Katz (Lutz 2010:167-181), *ballot position effect* terjadi dalam dua tahap: Pertama, dampak evaluasi calon legislatif. Pemilih cenderung akan mengevaluasi nama-nama dari atas, lalu akan mencoba mengevaluasi nama-nama calon legislatif ke nomor urut bawah, jika nama-nama yang perlu dievaluasi banyak maka pemilih akan mencoba mencari calon legislatif yang paling diingat. Berdasarkan penelitian Thebel (Lutz 2010:167-181), pemilih cenderung lebih mudah mengingat nama-nama calon legislatif di awal nomor urut dibandingkan di nomor-nomor akhir. Hal ini menyebabkan proses evaluasi kandidat dalam kertas suara menjadi terbatas. Selanjutnya, tahap kedua, penentuan sikap. Para *undecided voters* cenderung memilih orang-orang yang nomor urut

awal karena lebih mudah diingat dan lebih mudah dievaluasi, sedangkan para pemilih lainnya yang memiliki kecenderungan afiliasi partai politik yang kuat dan tidak memilikipreferensi calon legislatif yang cukup kuat, pemilih hanya akan memilih berdasarkan kesukaan partai dan evaluasi calon legislatif secara terbatas. Katz (Lutz 2010:167-181) menemukan ketika urutan calon legislatif dalam kertas suara disusun secara alphabet, posisi nomor urut satu masih lebih diuntungkan.

Penelitian Robin Devroe dan Braum Wauters (2018) menjelaskan secara cukup komprehensif pengaruh posisi nomor urut dalam kertas suara. Penelitian ini melakukan uji persepsi pemilih terhadap posisi nomor urut dalam kertas suara dengan metode penelitian eksperimen. Penelitian mereka menguji 3 mekanisme *ballot position effect*, yaitu: pertama, mekanisme seleksi yaitu ketika partai memilih calon legislatif yang menarik secara elektoral untuk posisi daftar teratas. Kedua, mekanisme kampanye yaitu ketika calon legislatif teratas mendapat lebih banyak perhatian dalam kampanye pemilihan. Terakhir, mekanisme pemilihan yang mudah yaitu pemilih cukup memilih seorang calon legislatif karena kurang memiliki informasi. Hasil penelitian Devroe dan Wauters (2018) menyebutkan persepsi masyarakat cenderung melihat orang yang berada dalam posisi nomor urut atas lebih kompeten daripada calon legislatif yang ada di nomor urut bawah. Hal ini menunjukkan bahwa secara heuristik, partai politik dapat mengindikasikan kepada pemilih bahwa posisi nomor urut atas merupakan calon legislatif yang lebih berkualitas. Penelitian ini setidaknya memberikan tambahan dalam kajian *ballot position effect* bahwa tidak sepenuhnya pemilih irasional dalam memilih calon legislatif nomor urut atas, tetapi ada proses rasionalitas tidak langsung berdasarkan penentuan posisi nomor urut yang dilakukan partai politik. Selain itu, penelitian Devroe dan Wauters (2018) memiliki asumsi yang memungkinkan ada tumpahan suara (*spillover effect*) dari posisi nomor urut satu kepada posisi nomor dua dan seterusnya walaupun hal ini belum dapat diukur. Penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi *low information* dalam pileg menguatkan *ballot position effect*.

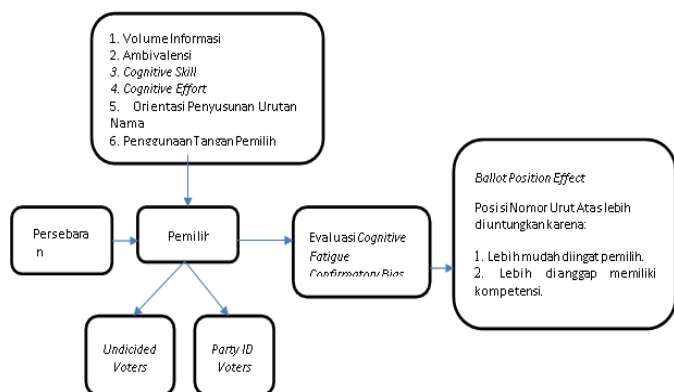
Dalam penelitian Kim, Krosnick, dan Casasanto (2015: 525-540) mencoba menjelaskan faktor-faktor yang memoderasi keberadaan *ballot position effect*, yaitu:

1. Volume informasi menyangkut tingkat informasi tentang calon legislatif.
2. Ambivalensi menyangkut perasaan yang bertentangan pemilih terhadap calon legislatif untuk dicari kelebihan dan kelemahan calon legislatif untuk memilih salah satu.

3. *Cognitive skill* menyangkut kemampuan pemilih dalam menerima, menyimpan, dan mengintergrasikan informasi calon legislatif.
4. *Cognitive effort* menyangkut seberapa jauh pemilih proses memikirkan pilihan pemilih terhadap calon legislatif tertentu.
5. Orientasi penyusunan nama menyangkut susunan pengurutan nama secara vertikal atau horizontal.
6. Penggunaan tangan pemilih menyangkut penggunaan tangan kiri atau kanan seorang pemilih.

Hasil penelitian Kim et, al. (2015: 525-540) menyebutkan, pertama, tingkat informasi yang rendah berpengaruh terhadap kekuatan faktor posisi nomor urut atas. Kedua, semakin tinggi tingkat *cognitive skill* dan *effort* pemilih, semakin berasosiasi dengan penurunan pengaruh posisi nomor urut teratas. Ketiga, pengaruh orientasi penyusunan nama sangat berpengaruh ketika orang-orang yang bertangan kiri cenderung memilih calon legislatif paling kiri dalam penyusunan nama secara horizontal. Berikut skema kerangka teori *ballot position effect*:

Gambar. II.2. Skema Ballot Position Effect



Sumber: diolah dan dikembangkan dari berbagai sumber seperti (Miller dan Krosnick 1998: 291-330; Lutz 2010:167-181; Kim et, al. 2015: 525-540)

Berdasarkan penelusuran hasil literatur dan kerangka teori, berikut adalah hipotesis yang akan diuji dalam artikel ini:

- H1: Status petahana calon legislatif berhubungan dengan kemenangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Banten tahun 2019.
- H2: Posisi nomor urut calon legislatif berhubungan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Banten tahun 2019.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan beberapa referensi buku acuan metodologi penelitian untuk membuat definisi operasional variabel penelitian, penentuan metode uji statistik, prosedur pengumpulan data, rangkaian penjelasan persamaan metode uji statistik yang digunakan, panduan aplikasi pembantu uji statistik SPSS. Acuan buku metodologi penelitian skripsi ini terdiri dari: Modul Ajar Statistika Sosial I karangan Bambang Riswandi (2017), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 karangan Imam Ghazali (2018), dan *Discovering Statistics Using IBM Statistics* karangan Andy Field (2018). Artikel ini membentuk definisi operasional, jenis skala, kategorisasi, dan pengkodean dalam penginputan data untuk menjelaskan masing-masing variabel, sebagai berikut:

Tabel C.1. Variabel-variabel dan Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Definisi	Symbol	Kategori dan Coding	Skala
Status_Petahana	Calon Legislatif yang memegang jabatan kursi DPR pada tahun 2014.	X1	Petahana = 1 Non-petahana = 0	Nominal
Nomor Urut	Posisi Nomor Urut dalam Kertas Suara	X2	1 sampai	Rasio
Kemenangan	Kemenangan Calon Legislatif	Y1	Menang = 1 Tidak menang=0	Nominal
Perolehan Suara	Perolehan Suara Calon Legislatif	Y2	Dalam Angka	Rasio

Peneliti menentukan metode uji berdasarkan skala variabel dan pertimbangan asumsi- asumsi masing-masing uji yang digunakan. Peneliti menguji secara bivariat (pengujian antar 2 variabel). Berikut akan dipaparkan jenis uji, syarat uji, penarikan kesimpulan dan variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini:

Tabel C.2. Penentuan Jenis Uji Penelitian

Jenis Uji	Syarat Uji	Penarikan Kesimpulan	Variabel-Variabel Uji
Uji <i>chi-square</i> (χ^2) (Independensi)	Skala 2 variabel minimal nominal dan maksimal ordinal.	Hubungan asosiasi antar variabel berhubungan /tidak berhubungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Status Petahana • Kemenangan
Uji <i>Phi</i>	Skala 2 variabel harus berkategori nominal dengan 2 tingkat sub-kategori (Tabel 2x2).	Keeratan asosiasi antar variabel 2 kategori dan memberikan arah hubungan (- /+).	<ul style="list-style-type: none"> • Status Petahana • Kemenangan

Uji Rank spearman	Skala kedua variabel minimalOrdinal	Keeratan korelasi antar variabel dan memberikan arah hubungan antar variabel (-/+)	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan Suara • Posisi Nomor urutan
Uji Pearson Product Moment	Skala kedua variabel harus numerik dan berdistribusi normal	Keeratan korelasi antar variabel dan memberikan arah hubungan antar variabel (-/+)	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan Suara • Posisi Nomor urutan

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum¹ dan dua situs pendukung layanan informasi peserta pemilihan umum Jari Ungu² dan Pintar Memilih³ untuk mencari Daftar Riwayat Hidup (DRH) kemenangan calon legislatif dalam pemilihan umum anggota legislatif DPR RI tahun 2019 daerah Pemilihan (dapil) Banten yang terdiri dari dapil Banten I, II, dan III. Penelitian ini menggunakan data populasi yang berisi jumlah observasi sejumlah 320 calon legislatif (N = 320). Dengan total calon legislatif dalam masing-masing dapil yaitu: dapil Banten I sejumlah 84 calon legislatif, Banten II sejumlah 88 calon legislatif, Banten III sejumlah 148 calon legislatif. Lihat Lampiran 1 untuk melihat set data yang digunakan.

Hasil Uji Statistik Bivariat

Peneliti menyusun tabel frekuensi silang, hasil analisa independensi (*chi-square*), korelasi *phi*, korelasi *cramer v*, korelasi *rank spearman* dan uji *pearson* antara variabel kemenangan calon legislatif (Y1) dengan berbagai variabel yang diperkirakan berhubungan dengan kemenangan tersebut. Berikut adalah hasilnya:

1. Hubungan Kemenangan Kursi (Y1) dan Status Petahana (X1)

Sebelum menguji hubungan kemenangan (Y1) dan Status Petahana (X1), peneliti terlebih dahulu menyajikan tabel silang variabel kemenangan (Y1) dan Status Petahana (X1). Berikut tabel silang variabel kemenangan (Y1) dan Status Petahana (X1):

Tabel. D. 1. Kemenangan Kursi (Y1) dan Status Petahana (X1) Calon Legislatif DPR RIBanten 2019 Status * Kemenangan Crosstabulation

			Kemenangan		Total
			kalah	Menang	
Status	non-petahana	Count	287	12	299
		% within Kemenangan	96.3%	54.5%	93.4%
Petahana	Count		11	10	21
		% within Kemenangan	3.7%	45.5%	6.6%
Total	Count		298	22	320
		% within Kemenangan	100.0%	100.0%	100.0%

Berdasarkan tabel tersebut, proporsi kelompok petahana cenderung memenangkan kursi daripada proporsi kelompok non-petahana. Sebanyak 12 orang non-petahana (54,5%) dan 10 orang petahana (45,5%) berhasil memenangkan kursi DPR RI dari total 22 kursi yang diperebutkan. Mayoritas kelompok non-petahana mengalami kekalahan (96%), sedangkan kelompok petahana hampir setengahnya memenangkan kursi DPR RI.

Peneliti menggunakan uji independensi (*chi-square*) untuk mengetahui keberadaan hubungan antara variabel kemenangan kursi (Y1) dan Status Petahana (X1). Berikut hasil uji independensi (*chi-square*) antara variabel kemenangan kursi (Y1) dan Status Petahana (X1):

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	58.276 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	51.664	1	.000		
Likelihood Ratio	30.503	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	58.094	1	.000		
N of Valid Cases	320				

- 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.44.
- Computed only for a 2x2 table

Hasil uji *chi-square* menemukan hubungan (asosiasi) yang signifikan secara statistik antara kemenangan calon legislatif dan status petahana (definisi 1). Status petahana (Definisi 1) dan kemenangan memiliki nilai *chi-square* hitung sebesar 58,276 dengan nilai *chi-square* tabel sebesar 3,84 (DF = 1 dan taraf signifikansi (α) = 0,05), maka nilai 58,276 > 3,84 menolak H₀ (*p-value* = 0,000). Kesimpulannya, variabel kemenangan dan Status Petahana (definisi 1) memiliki asosiasi (hubungan) yang signifikan secara statistik.

Peneliti menggunakan uji korelasi Phi untuk menguji hubungan kemenangan kursi (Y1) dan Status Petahana (X1) karena tabel silang kedua variabel tersebut berbentuk 2x2. Berikut hasil uji korelasi Phi untuk menguji hubungan kemenangan (Y1) dan Status Petahana (X1):

¹ <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>

² <https://jariungu.com>

³ <https://pintarmemilih.id>

Tabel. D.3. Uji korelasi *Phi* Kemenangan Kursi (Y1) dan Status Petahana (X1) Calon Legislatif DPR RI Banten 2019
Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.427	.000
	Cramer's V	.427	.000
N of Valid Cases		320	

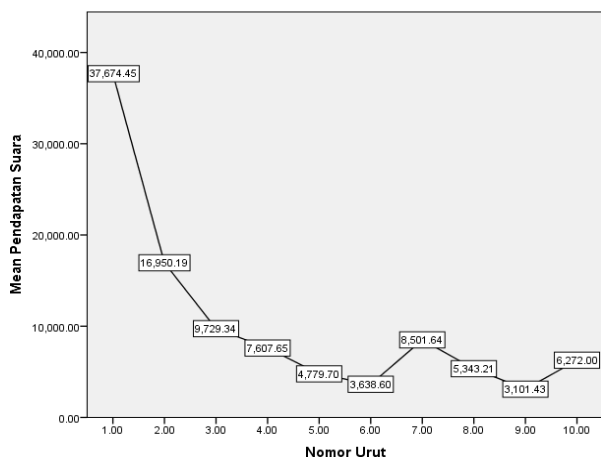
- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Hasil uji *phi* menemukan hubungan (asosiasi) yang signifikan secara statistik dengan tingkat keeratan asosiasi sedang antara kemenangan calon legislatif dan status petahana (definisi 1). Status petahana (definisi 1) dan kemenangan memiliki nilai *phi* hitung 0,427 yang berarti tingkat keeratan asosiasi sedang pada *p-value* (sig) = 0,000 yang berarti sangat signifikan secara statistik. Terdapat perbedaan peluang kemenangan antara petahana dan non-petahana dari nilai hitung *phi* yang bersifat positif. Hasil uji *phi* menemukan bahwa ketika caleg memiliki status petahana (definisi 1), maka ia memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan kursi dalam pemilihan tersebut daripada caleg dengan status non-petahana (definisi 1).

2. Hubungan Perolehan Suara (Y2) dan Posisi Nomor Urut (X2)

Sebelum menguji hubungan perolehan suara (Y2) dan posisi nomor urut (X2), peneliti terlebih dahulu menyajikan gambar grafik rata-rata perolehan suara (Y2) terhadap posisi nomor urut (X2). Berikut gambar grafik rata-rata perolehan suara (Y2) terhadap posisi nomor urut (X2):

Gambar. D.1. Grafik Rata-rata Perolehan Suara (Y2) terhadap Posisi Nomor Urut (X2)



Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa posisi nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak dengan rata-rata memperoleh suara sebanyak 37.674 suara, lalu terjadi penurunan rata-rata perolehan suara pada posisi nomor urut 2 dan seterusnya sampai pada posisi nomor urut 6.

Terjadi peningkatan rata-rata perolehan suara pada posisi nomor urut 7, namun pada posisi nomor urut berikutnya terjadi penurunan sampai posisi nomor urut 9. Peneliti menduga kenaikan rata-rata perolehan posisi nomor urut 7 karena dapil Banten III memiliki calon-calon yang berposisi nomor urut 1 sampai dengan 10, sedangkan dapil Banten I dan II hanya memiliki calon-calon yang berposisi nomor urut 1 sampai dengan 6. Selain itu, terdapat perbedaan total suara antara masing-masing dapil. Hal ini menyebabkan tidak adanya rata-rata perolehan suara antara posisi nomor urut 7 sampai dengan 10 dari dapil Banten I dan II, sehingga terjadi rata-rata perolehan suara yang tidak proporsional. Peneliti menduga jika Banten I dan II juga memiliki calon-calon yang bernomor urut 7 sampai dengan 10 seperti Banten III, maka penurunan rata-rata perolehan suara akan terus terjadi. Peneliti menggunakan uji *rank spearman* untuk mengetahui arah dan keeratan hubungan (korelasi) posisi nomor urut dan perolehan suara. Arah korelasi dapat bersifat positif atau negatif yang menghasilkan interpretasi yang berbeda tentang arah hubungan antara dua variabel uji, sedangkan keeratan hubungan (korelasi) dapat dinilai menggunakan dasar pengambilan keputusan tingkat keeratan hubungan yang digunakan pada uji *phi*. Berikut hasil hitung *rank spearman* posisi nomor urut dan perolehan suara:

Tabel.D.4. Hasil Uji *Rank spearman* Perolehan Suara (Y2) dan Posisi Nomor Urut (X2)
Correlations

		Pendapatan Suara	Nomor Urut
Pendapatan Suara	Correlation Coefficient	1.000	-.400**
	sig. (2-tailed)	.	.000
Spearman's rho	N	320	320
	Correlation Coefficient	-.400**	1.000
Nomor Urut	sig. (2-tailed)	.000	.
	N	320	320

Hasil uji *rank spearman* menemukan arah hubungan negatif antara posisi nomor urut dan perolehan suara pada *p-value* (sig) = 0,000 yang signifikan secara statistik. Posisi nomor urut dan perolehan suara memiliki hasil hitung uji *rank spearman* sebesar -0,400 yang berarti memiliki tingkat keeratan hubungan sedang. Hasil hitung uji *rank spearman* menunjukkan arah hubungan negatif. Arah hubungan negatif menunjukkan semakin besar posisi nomor urut (menjauh dari posisi nomor urut 1/mendapatkan nomor urut bawah), maka semakin kecil perolehan suara calon legislatif. Sebaliknya, semakin kecil posisi nomor urut (mendekati posisi nomor urut 1/mendapatkan nomor urut atas) semakin besar perolehan suara calon legislatif.

Selain menggunakan uji *rank spearman*, peneliti menggunakan uji *pearson* untuk mengetahui arah dan keeratan hubungan (korelasi) posisi nomor urut dan perolehan suara. Hasil uji hitung *pearson* diinterpretasikan sama dengan uji

rank spearman. Perbedaan mendasar antara uji rank spearman dan uji pearson adalah syarat data yang terdistribusi normal. Namun, syarat data harus terdistribusi normal dapat dihiraukan karena skripsi ini menggunakan data populasi. Berikut adalah hasil dari hitung korelasi Pearson:

Tabel.D.5. Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment antara Perolehan Suara (Y2) dan Posisi Nomor Urut (X2) Correlations

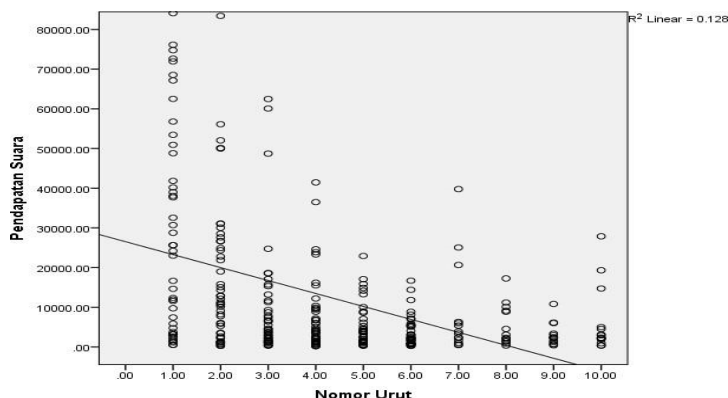
		Pendapatan Suara	Nomor Urut
Pendapatan Suara	Pearson Correlation	1	-.358**
	sig. (2-tailed)		.000
	N	320	320
Nomor Urut	Pearson Correlation	-.358**	1
	sig. (2-tailed)	.000	
	N	320	320

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji pearson menemukan hubungan dengan arah hubungan negatif antara posisi nomor urut dan perolehan suara pada p-value (sig) = 0,000 yang berarti signifikan secara statistik. Posisinomor urut dan perolehan suara memiliki hasil hitung uji rank spearman sebesar -0,385 yang berarti tingkat keeratan hubungan rendah. Hasil hitung uji pearson menunjukkan arah hubungan negatif. Arah hubungan negatif menunjukkan semakin besar posisi nomor urut (menjauh dari posisinomor urut 1/mendapatkan nomor urut bawah), maka semakin kecil perolehan suara calonlegislatif. Sebaliknya, semakin kecil posisi nomor urut (mendekati posisi nomor urut1/mendapatkan nomor urut atas) semakin besar perolehan suara calon legislatif.

Peneliti menyajikan gambar scater plot untuk menunjukkan arah hubungan korelasi negatif antara perolehan suara (Y2) dan posisi nomor urut (X2). Berikut gambar scater plot arah hubungan korelasi negatif antara perolehan suara (Y2) dan posisi nomor urut (X2):

Gambar.D.2. Arah Hubungan Korelasi Scatter Plot Perolehan Suara (Y2) dan Posisi Nomor Urut (X2)



PEMBAHASAN

Hasil uji menemukan status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara berhubungan dengan kemenangan kursi legislatif DPR RI di Daerah Pemilihan Banten pada tahun2019. Dari hasil analisis yang menggunakan uji chi-square dan

phi ditemukan hubungan signifikansecara statistik antara kemenangan dan status petahana (phi hitung= 0,427 dengan p-value (sig) =0,000).

Peneliti menduga keunggulan petahana (incumbency advantages) terjadi karena petahana memiliki kombinasi kualitas dalam advertising atau pengiklanan kapasitas diri sebagai mantan anggota legislatif atau eksekutif, credit claiming atau aktivitas mengklaim kebijakan yang dianggap menguntungkan selama masa jabatan menjadi legislatif, position taking atau petahana mengambil sikap tertentu yang dapat menjadi sensasi agar menjadi perhatian dan popularitas. Salah satu keunggulan petahana yang kuat biasanya memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki petahana untuk menjaga membangun hubungan personal yang intim dan clientelistic dengan konstituennya. Hubungan personal dan intim ini berasal dari jaringan sosial, hubungan finansial, dan sumberdaya organisasi yang petahana miliki untuk menjaga konstituen dapilnya agar dapat memilihnya kembali. Selain itu, petahana legislatif memiliki keunggulan daripada non-petahana karena dapat memfokuskan perhatian pemilih untuk mendapatkan kesan yang lebih baik dengan melakukan kontrol informasi terkait kinerja petahana di DPR.

Keberadaan keunggulan petahana ini mengindikasikan kondisi masyarakat yang kurang dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja legaslatif atau eksekutif. Survei opini publik tentang persepsi kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI pada tahun 2018 menangkap tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap DPR sebagai institusi terendah tingkat kepercayaannya daripada instansi kenegaraan lainnya.⁴ Hasil survei opini publik tersebut berbanding terbalik dengan hasil pemilu legislatif 2019 yang menghasilkan kemenangan yang banyak bagi petahana-petahana. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR seharusnya menjadi faktor evaluasi yang kuat dimasyarakat untuk terjadinya penurunan keunggulan petahanadalam mendapatkan kursi. Beberapa literasi membuktikan incumbency advantages tidak terjadi jika ada faktor evaluatif yang tinggi terhadap instansi legislatif dan pemerintah dari masyarakat, seperti yang terjadi di India dan beberapa negara-negara berkembang. Tingkat pengetahuan dan informasi mengenai calon-calon legislatif sangat memengaruhi faktor evaluasi pemilih terhadap calon-calon legislatif dan petahana.

⁴ Survei LSI: DPR, Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Terendah", dilihat di <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah>.

Faktor lemahnya persebaran informasi pemilihan umum legislatif dan calon-calon legislatif dapat menjadi faktor yang memengaruhi lemahnya tingkat evaluasi masyarakat terhadap calon-calon legislatif petahana. Tingkat informasi yang rendah dalam masyarakat mendorong masyarakat untuk tetap memilih petahana DPR karena aliran informasi tentang kinerja petahana dapat dikuasai oleh petahana itu sendiri. Kekuasaan aliran informasi kinerja petahana menyebabkan pemilih cenderung memilih petahana yang dianggap memiliki pengalaman lebih baik di DPR dan menolak calon legislatif non-petahana yang belum tentu lebih baik.

Hasil uji analisis *rank spearman* dan *pearson* ditemukan hubungan signifikan secara statistik antara perolehan suara dan posisi nomor urut serta arah hubungan negatif (*spearman* = - 0,400 dengan *p-value* (sig) = 0,000 dan *pearson* = -0,358 dengan *p-value* (sig) = 0,000). Arah hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin kecil posisi nomor urut (mendekati nomor urut 1), semakin tinggi perolehan suara calon. Sebaliknya, semakin besar posisi nomor urut (menjauh dari nomor urut 1), semakin rendah perolehan suara calon.

Peneliti menduga kecenderungan calon legislatif dengan posisi nomor urut atas mendapatkan perolehan suara yang tinggi karena pemilih di Banten cenderung melakukan bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah suatu proses memilih pemilih yang dimulai dari proses pencarian ingatan tentang seorang calon legislatif, lalu mencari-cari alasan untuk memilih seorang calon legislatif secara subjektif, dan menerima alasan subjektif tersebut, tanpa mencari alasan untuk tidak memilih seorang calon legislatif tertentu. Bias konfirmasi terjadi karena daftar panjang nama-nama calon yang menyebabkan kelelahan kognitif (*cognitive fatigue*) ketika melakukan evaluasi calon-calon legislatif. Kelelahan kognitif adalah proses evaluasi yang terlalu berat bagi pemilih yang biasanya disebabkan daftar panjang nama-nama calon dalam kertas suara. Daftar panjang nama-nama calon dalam kertas suara akan menyebabkan proses usaha evaluasi secara objektif yang dilakukan pemilih cenderung gagal karena kurangnya informasi terhadap masing-masing calon legislatif. Proses pemilihan yang berasal dari kelelahan kognitif ini akan berdampak pada biasanya pemilih untuk memilih nomor urut atas yang lebih tampak untuk dievaluasi dan dicarilasan-alasan dalam memilih calon. Daftar panjang nama-nama calon legislatif dalam kertas suara terlihat dari jumlah masing-masing calon legislatif di daerah pemilihan Banten. Calon legislatif di daerah pemilihan Banten III berjumlah 148 calon legislatif, Calon legislatif di daerah pemilihan Banten I berjumlah 83 calon legislatif, Calon legislatif di

daerah pemilihan Banten II berjumlah.

83 calon legislatif. Pemilih akan kesulitan dalam mengevaluasi seorang calon legislatif di pemilihan umum legislatif DPR Banten dari sekian banyaknya calon-calon yang berkontestasi.

Peneliti menduga faktor evaluasi calon legislatif yang terbatas karena daftar panjang nama-nama calon legislatif di daerah pemilihan Banten akan menyebabkan para *undecided voters* cenderung memilih orang-orang yang nomor urut awal karena lebih mudah diingat dan lebih mudah dievaluasi, sedangkan para pemilih yang sudah memiliki afiliasi partai politik yang kuat (*party id*) tetapi tidak memiliki preferensi calon legislatif yang cukup kuat akan cenderung memilih orang-orang yang nomor urut atas karena kepercayaan kepada partai politik yang mengindikasikan kepada pemilih bahwa calon legislatif yang memiliki posisi nomor urut atas dalam kolom partai politiknya merupakan calon legislatif yang berkualitas. Peneliti juga menduga persepsi masyarakat di daerah pemilihan Banten cenderung melihat orang yang berada dalam posisi nomor urut atas lebih kompeten daripada calon legislatif yang ada di nomor urut bawah.

Kuatnya dampak posisi nomor urut dalam pemilu legislatif dapat disebabkan ketika tidak ada tanda-tanda (*cues*) dalam kertas suara. Isi kertas suara di pemilihan legislatif DPR RI Indonesia hanya mencantumkan nama, posisi nomor urut, dan asal partai. Ketiadaan tanda-tanda seperti status petahana/non-petahana, agama, gender, etnis, wajah, dan penampilan berpotensi menguatkan posisi nomor urut sebagai faktor perolehan suara.

KESIMPULAN

Pemilihan umum legislatif seharusnya menghasilkan wakil rakyat yang terbaik dan berkualitas. Proses pemilihan umum legislatif adalah proses seleksi calon-calon legislatif yang dipilih pemilih. Pemilih sebagai penentu hasil pemilihan umum legislatif harus melakukan proses evaluasi yang tepat terhadap calon-calon legislatif untuk menentukan wakil rakyat yang berkualitas. Namun, dalam proses pelaksanaan pemilihan legislatif terdapat masalah dalam mengevaluasi calon-calon legislatif untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Artikel ini mengangkat tiga masalah utama evaluasi calon-calon legislatif dalam pemilihan umum legislatif, yaitu:

1. Petahana cenderung memenangkan kembali kursinya, padahal masyarakat tidak mempercayai lembaga DPR RI pada periode sebelumnya.
2. Calon legislatif yang memiliki posisi nomor urut atas dalam kertas suara

cenderung menang yang menunjukkan keterbatasan evaluasi pemilih.

Masalah-masalah tersebut terjadi karena persebaran informasi yang rendah tentang calon-calon legislatif dan pelaksanaan pemilu legislatif, rendahnya tingkat literasi politik masyarakat, dan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Kekurangan informasi calon legislatif dan pelaksanaan pemilu legislatif akan berdampak pada tingkat kemampuan pemilih yang rendah dalam melakukan proses evaluasi karena informasi-informasi seperti kinerja petahana, latarbelakang pendidikan, pengalaman, dsb dapat berguna sebagai bahan pertimbangan pemilih dalam mengevaluasi calon-calon. Literasi politik adalah kemampuan untuk memahami isu-isu politik dan dampaknya kepada kehidupannya. Pemahaman literasi politik akan sangat berguna bagi pemilih untuk mengevaluasi setiap calon-calon legislatif dengan berdasarkan informasi-informasi yang dimilikinya. Partisipasi politik masyarakat juga sangat dibutuhkan yang dalam bentuk paling minimalnya adalah mencari informasi terkait calon-calon legislatif yang bertarung di daerah pemilihannya. Partisipasi politik dan tingkat literasi politik akan berdampak pada pemilih yang telah menentukan sikap secara jelas (*decided voters*) dan rasional. Berdasarkan hal tersebut, berikut beberapa saran untuk terjadi perbaikan sistem pemilihan umum legislatif dan meningkatkan kemampuan evaluasi pemilih:

1. Mempertimbangkan kembali hak publikasi Daftar Riwayat Hidup (DRH) calon legislatif menjadi kewajiban untuk menjamin informasi latar belakang calon legislatif.
2. Meningkatkan kemampuan evaluasi pemilih dan partisipasi politik masyarakat dengan menjalankan fungsi pendidikan politik oleh partai politik atau melalui program peningkatan literasi politik dan partisipasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
3. Meningkatkan informasi terkait penyelenggaraan pemilu legislatif dan meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap pemilu legislatif oleh KPU.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Field, Andy. 2018. *Discovering Statistics Using Ibm Statistics*, London: Sage
- Ghazali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mayhew, David. R. 1974. *Congress: The Electoral Connection*. United States Of America: Yale University Press.

Riswandi, Bambang. 2017. *Modul Ajar Statistika Sosial II*, [Diktat Mata Kuliah Statistik] Universitas Islam Negeri Jakarta: FISIP.

Stonecash, Jeffrey M. 2008. *Reassessing Incumbency Effect*, Cambridge University Press, New York

DISERTASI

Ariga, Kenichi. 2010. *Entrenched Incumbents, Irresponsible Parties? Comparative Analysis Of Incumbency Advantage Across Different Electoral Systems*. University Of Michigan

ARTIKEL JURNAL

Cox, Gary W. dan Jonathan N. Katz, 1996. "Why Did The Incumbency Advantage in U.S. House Elections Grow?", *American Journal Of Political Science*, Vol. 40, No. 2 Mei, 478-497, [jurnal on-line];

<http://www.jstor.org/stable/2111633>

Dettman, Sebastian, Thomas Pepinsky, dan Jan Pierskalla. 2017. "Incumbency Advantage And Candidate Characteristics In Open-List Proportional Representation Systems: Evidence From Indonesia", dalam *Electoral Studies* Vol. 48 Juni [jurnal on-line]; dapat diunduh di https://www.researchgate.net/publication/317340155_incumbency_advantage_and_candidate_characteristics_in_open-list_proportional_representation_systems_evidence_from_indonesia Internet; diunduh pada 9 Desember 2019.

Devroe, Robin, dan Bram Wauters, 2018. "Does High on The Ballot Means Highly Competent? Explaining The Ballot Position Effect in List-Pr Systems", *Acta Polit*, November, [jurnal on-line];

<https://link.springer.com/article/10.1057/s41269-018-0124-y>

Kim, Nuri, Jon Krosnick, dan Daniel Casasanto. 2015. "Moderators of Candidate Name-Order Effects in Elections: an Experiment", *Political Psychology*, Volume. 36, No. 5, 525-540 [jurnal on-Line]; <https://www.jstor.org/stable/43783882?seq=1>

Lutz, Georg. "First Come, First Served: The Effect Of Ballot Position On Electoral Success In Open Ballot Pr Elections", *Representation*, Volume 46, No.2, 167-181, [jurnal on-line]; <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00344893.2010.485808>

- Miller Joeane dan Jon Krosnick. 1998. "The Impact of Candidate Name Order on Election Outcomes", *Public Opinion Quarterly*, Volume 62, No. 3. September, 291-330 [jurnal on-Line];
<https://academic.oup.com/poq/article-abstract/62/3/291/1936633?redirectedfrom=pdf>
- Molina, Jose. 2001. "The Electoral Effect of Underdevelopment: Government Turnover and Its Causes in Latin-American, Caribbean and Industrialized Countries", *Electoral Studies*, Volume 20, 427-446. [jurnal on-line];
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379400000305>
- Moral, Mert, H. Ege Ozen, dan Efe Tokdemir, 2015. "Bringing The Incumbency Advantage Into Question for Proportional Representation", *Electoral Studies*, Vol. 40 Tahun, 56-65, [jurnal on-Line];
<http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2015.06.007>
- Parker, Glenn R. 1980. "The Advantage of Incumbency in House Elections" *American Politics Quarterly*, Vol 8 No 4, October, 449-464, [jurnal on-line];
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1532673x8000800404?journalcode=apra>
- Prihatini, Ella S. 2019. "Women Who Win In Indonesia: The Impact Of Age, Experience, And List Position", *Women's Studies International Forum*, Vol 72, January-February, 40-46. dapat diunduh di <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027753951830428x> Internet; diunduh Pada 9 Desember 2019
- Uppal, Yogesh, 2009. "The Disadvantaged Incumbents: Estimating Incumbency Effects in Indian State Legislatures", *Public Choice*, Vol 138, 9-27. [jurnal on-line];
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11127-008-9336-4>
- anggota-dpr-nyaleg-lagi
 kompas.com, "Begini Cara Cermati Caleg yang Berkualitas Menurut Perludem", dilihat dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/05000001/begini-cara-cermati-caleg-yang-berkualitas-menurut-perludem> dilihat pada 11 desember 2019.
- , "Perludem: Jangan Pilih Caleg yang Tak Mau Buka Riwayat Hidupnya"
- , "Survei LSI: DPR, Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Terendah", dilihat di <http://parlemenindonesia.org>, "Anatomi Caleg DPR RI Terpilih Pada Pemilu 2014" diakses pada 11 desember 2019 dari <http://parlemenindonesia.org/wp-content/uploads/2014/02/anatomi-caleg-pemilu-2014.pdf>

BERITA DAN ARTIKEL ONLINE

- beritasatu.com, "DPR Didominasi Wajah Lama, Formappi: Pemilu Belum Jadi Ajang Reward and Punishment", artikel diakses pada 11 desember 2019 dari <https://www.beritasatu.com/politik/573551/dpr-didominasi-wajah-lama-formappi-pemilu-belum-jadi-ajang-reward-and-punishment>
- detik.com, "Formappi: 94 Persen Anggota DPR Nyaleg Lagi", artikel diakses pada 11 desember 2019 dari <https://news.detik.com/berita/d-4211613/formappi-94-persen->